

# “STUDI KELAYAKAN PENEMPATAN LO/SLO POLRI DI KAWASAN ASEAN DAN ASIA”

(Hasil penelitian Bagjianbang Rolitbang Polri)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Dasar

- a. Program Kerja Biro Litbang Sderembang Polri Tahun Anggaran 2005
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Litbang Sderembang Polri Tahun Anggaran 2005
- c. Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/1374, 1375, 1376/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang pelaksanaan “Studi Kelayakan Penempatan LO/SLO Polri di Kawasan Asean dan Asia” khususnya ke Malaysia, Singapura dan Brunai.
- d. Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/2263, 2264, 2265/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang pelaksanaan “Studi Kelayakan Penempatan LO/SLO Polri di Kawasan Asean dan Asia” khususnya ke Jepang, China dan Korea Selatan.
- e. Surat Tugas Karo Litbang Sderembang Polri No. Pol. : SGAS/04/I/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang “Studi Kelayakan Penempatan LO/SLO Polri di Kawasan Asean dan Asia”.

#### 2. Maksud Dan Tujuan

##### a. Maksud

Maksud Ringkasan Eksekutif ini disusun adalah untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil studi kelayakan dimaksud yang diperoleh selama proses pelaksanaan penelitian pada beberapa negara yang menjadi sampel penelitian.

##### b. Tujuan

Tujuan penyusunan Ringkasan Eksekutif ini adalah untuk memberikan informasi secara singkat kepada pimpinan dan pihak-pihak terkait tentang variabel-variabel kelayakan penempatan LO/SLO Polri serta negara-negara mana yang menjadi prioritas dalam merealisasikan penempatannya.

#### 3. Kegunaan Penelitian

Untuk menentukan parameter kelayakan, skala prioritas negara tujuan penempatan LO/SLO Polri, standar kemampuan calon LO/SLO Polri, serta evaluasi terhadap kinerja LO/SLO Polri yang telah ada pada 6 (enam) negara selama ini.

#### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Ringkasan Eksekutif ini meliputi ; Pendahuluan, Metodologi Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi serta Penutup.

#### 5. Tata Urut

- BAB I : PENDAHULUAN  
 BAB II : METODOLOGI PENELITIAN  
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  
 BAB V : PENUTUP

## BAB II

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Lokasi dan Sampel Penelitian

- a. Lokasi Studi Kelayakan  
Lokasi studi kelayakan SLO / LO Polri antara lain meliputi :
- 1) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, dan Konjen Tawau, Sabah, Malaysia
  - 2) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Beijing, China
  - 3) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang
  - 4) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura
  - 5) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam
  - 6) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan.
- b. Sampel Responden Penelitian
- 1) Kelompok Responden Dubes/Staf Kedubes
    - a) Duta Besar Republik Indonesia Malaysia
    - b) Duta Besar Republik Indonesia Singapura
    - c) Duta Besar Republik Indonesia Cina
    - d) Duta Besar Republik Indonesia Korea
    - e) Duta Besar Republik Indonesia Jepang
    - f) Duta Besar Republik Indonesia Brunai Darussalam
  - 2) Kelompok Responden Atase/perwakilan teknis
    - a) Minister Counsellor
    - b) Atase Imigrasi
    - c) Atase Ketenagakerjaan
    - d) Atase Pertahanan
    - e) Atase Perdagangan
  - 3) Kelompok Responden SLO/LO Polri
    - a) SLO di Kedubes RI Malaysia
    - b) SLO di Kedubes RI Australia
    - c) SLO di Kedubes RI Arab Saudi
    - d) SLO di Kedubes RI Philipina
    - e) SLO di Kedubes RI Thailand
    - f) SLO di Kedubes RI Timor Leste
    - g) LO di Konjen RI Tawao
    - h) LO di Konjen RI Kucing

#### 3. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kategorisasi data-data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner, dari kuesioner yang ada digunakan untuk pengumpulan data penelitian dilokasi kedubes RI dinegara kawasan ASEAN dan ASIA yang berisi pertanyaan tertutup dan terbuka. Sedangkan teknik pengolahannya dapat menggunakan rumus "Aritmethic Mean of Group" seperti di bawah ini :

$$\bar{X} = \frac{\sum \sum (fx)}{n}$$

$\bar{X}$  : *sample mean*

$\sum \sum$  : *simbol meaning "the sum of"*

$f$  : *frequency (member of observation) in each class*

$x$  : *mid point for each class the sample*

$n$  : *member of observation in the sample*

$$m = \frac{(n+1)/2 - (F+1)}{f_m} \left. \vphantom{m} \right\} w + L_n$$

$m$  : *sampel media*

$n$  : *total member of item in the distribution*

$F$  : *sum of all class frequecies up to, but not including, the median class*

$W$  : *class-interval width*

$L_n$  : *lower limit of the median-class interval*

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis. Data-data yang diperoleh ada yang berasal dari lapangan (*field research*) dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket/kuesioner dan pedoman wawancara baik tertutup maupun terbuka (*indepth interview*) serta data kepustakaan (*library research*) berupa dokumen laporan (report) baik dari Kedubes negara-negara akreditasi, maupun laporan (report) dari para LO/SLO Polri.

**1. Skala prioritas negara tujuan penempatan SLO Polri**

a. Variabel aspek hubungan kerja sama Penegakan Hukum

1) Prioritas negara-negara tujuan penempatan SLO Polri ditinjau dari aspek hubungan kerjasama penegakan hukum dengan Republik Indonesia, sebagai berikut :

NO	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN SLO	BENTUK KERJASAMA GAKKUM DENGAN RI					%
		ICPO	COMTC	ASEANA	BRMMC	JCLEC	
		-interpol		POL			
1	SINGAPURA	√√	√√	√√	√√	√√	100
2	VIETNAM	√√	√√	√√	√√	√√	100
3	MYANMAR	√√	√√	√√	√√	√√	100
4	KAMBOJA	√√	√√	√√	√√	√√	100
5	LAOS	√√	√√	√√	√√	√√	100
6	BRUNEI	√√	√√	√√	√√	√√	100
7	PAPUA NEW GINI	√√	-	-	-	√√	40
8	NEW ZEALAND	√√	-	-	√√	√√	60
9	JAPAN	√√	√√	-	OO	-	60
10	KOREA SELATAN	√√	√√	-	√√	√√	80
11	CHINA	√√	√√	-	√√	√√	80
12	HONGKONG	-	-	-	-	-	-
13	PRANCIS	√√	-	-	√√	-	40
14	JERMAN	-	-	-	√√	-	20
15	INGGRIS	-	-	-	√√	-	20
16	USA	√√	√√	-	√√	-	60
17	KANADA	√√	√√	√√	√√	√√	20
18	BELANDA	-	-	-	-	-	-
19	INDIA	-	-	-	-	-	-
20	KOREA UTARA	-	-	-	-	-	-

2) Prioritas negara-negara tujuan penempatan SLO Polri ditinjau dari Jumlah WNI yang terlibat masalah hukum di Luar Negeri, sebagai berikut :

NO	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN SLO	JENIS KASUS			TAHUN KEJADIAN	KET
		TKI	KRIMUM	LAIN-LAIN		
1	SINGAPURA					Sumber data BHI Deplur: data kejahatan belum tercatat secara Valid mengingat lembaga (BHI) yg menangani masalah tsb masih baru
2	VIETNAM					
3	MYANMAR					
4	KAMBOJA					
5	LAOS					
6	BRUNEI	34	-	-	2004	
7	PAPUA NEW GINI					

8	NEW ZEALAND					
9	JAPAN					
10	KOREA SELATAN	5	4	2000-2003		
11	CHINA					
12	HONGKONG					
13	PRANCIS					
14	JERMAN					
15	INGGRIS					
16	USA		2 (bunuh)	1 (narkoba)	1995-1996	
17	KANADA					
18	BELANDA					
19	INDIA					
20	KOREA UTARA					

**b. Variabel Hubungan Bilateral**

1) Prioritas negara-negara tujuan penempatan SLO Polri di kawasan Asean ditinjau dari hasil penilaian variabel potensi kelayakan adalah sebagai berikut :

VARIABEL POTENSI KELAYAKAN	ASEAN																
	Brunei		Kamboja		Laos		Malaysia		Philippina		Singapur		Thailand		Vietnam		
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	
Jumlah populasi	√		X		X	√				√							
WNI pekerja/ Mhs/pelajar																	
Negara yang mempunyai teknologi kepolisian tinggi						X		X									
Negara yang berbalasan dengan wilayah RI	√																
Negara yang memiliki hubungan dengan kasus terorisme																	
Negara terdapat markas Peace keeping Operation									√								
Negara mempunyai arus perdagangan tinggi dengan RI												√					
Negara yang berpotensi/real ttg kasus narkoba												√					
Negara yang berpotensi/real mempunyai afiliasi dengan separatisme																	
Negara yang masuk dalam persetujuan																	



Rata-rata tanggapan responden Dubes dan staf mengenai posisi penempatan SLO Polri dalam struktur KBRI sebagai Sekretaris I Bidang Politik masih cenderung ragu-ragu karena bisa berdampak pada pelaksanaan tugas yang tidak akan maksimal dalam memainkan perannya sebagai SLO Polri. Hal ini berdasarkan hasil analisa tabel diatas yang menunjukkan nilai mean sebesar 57.73%, dimana nilai ini berada pada interval kelas ke-2 yang termasuk dalam kategori ragu-ragu.

Keragu-raguan responden akan hal ini sangat beralasan karena dengan memberi *cover (posisi)* sebagai sekretaris I bidang politik akan membawa konsekuensi bahwa di mata pihak luar pejabat tersebut sebagai *Political Officer* yang tidak akan maksimal menjalankan fungsi dan perannya sebagai SLO Polri, oleh karenanya SLO Polri harus mandiri seperti halnya Atase yang lain.

Hal senada juga dikemukakan oleh responden SLO Polri di delapan negara, dari hasil penilaian pendapat rata-rata responden, menganggap bahwa posisi jabatan struktural SLO/LO Polri saat ini kurang tepat. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai mean dari tabel tentang analisa posisi jabatan struktural SLO Polri di KBRI sebesar 62,56% yang artinya posisi jabatan SLO Polri saat ini dianggap kurang tepat.

Selanjutnya bagaimana dengan status diplomat yang dimiliki SLO Polri saat ini dan bagaimana rencana pengembangannya. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan keseragaman pendapat dikemukakan responden SLO Polri di enam negara yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

2) Status diplomat SLO Polri dalam pelaksanaan tugas

NO	Interval kelas (%)	Nilai tengah (x)	Jumlah responden (f)	(f) * (x)	MEAN (rata-rata) (%)
(1)	67 - 100	83,50	7,00	584,50	
(2)	34 - 66	50,00	1,00	50,00	79,31
(3)	00 - 33	16,50	0,00	0,00	
	<b>Jumlah</b>		8,00	634,50	

Hasil perhitungan statistik yang ditunjukkan dengan nilai mean (rata-rata) dari tabel analisa diatas sebesar 79.31% yang berada pada interval kelas ke-1 memberi arti bahwa status diplomat sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagai SLO Polri. Untuk mendukung ke arah tersebut perlu diangkat dalam forum kerjasama antar instansi POLRI, Deplu, dan Men-Pan dalam bentuk "*Mandatory Counsellor Notification*" dengan demikian struktur SLO Polri menjadi bagian dari "*International Police Cooperation*" sehingga jabatan SLO Polri sejajar dengan atase teknis lainnya dan menjadi bagian dari *Corp Diplomatic*.

b. Ditinjau dari parameter standar dan kinerja SLO, sebagai berikut :

NO	Standar dan kinerja LO/SLO Polri	Hasil/Kondisi
1	Lokasi Kantor	Sangat layak
2	Prasarana peralatan Kantor	Cukup memadai
3	Sarana Transportasi	Baik
4	Fasilitas Pemukiman	Baik
5	Sistem Penggajian/TPLN	Cukup
6	Penyaluran Anggaran	Kurang lancar

7	Biaya Operasional/Tindakan Kepolisian	Cukup
8	Eselonisasi Jabatan	Kurang sesuai
9	Beban Tugas	Cukup memadai
10	Koordinasi SLO/LO dengan pejabat Mabes Polri	Baik
11	Informasi masyarakat dalam tugas SLO/LO	Kooperatif
12	Komunikasi dengan Mabes Polri	Baik
13	Koordinasi dengan staf KBRI	Kooperatif
14	Periode Penugasan	Cukup
15	Info public mendukung tugas LO/SLO	Cukup banyak
16	Sistem Pelaporan oleh SLO/LO Polri	Seragam
17	Tenggang waktu laporan SLO/LO	Bulanan
18	Pembuatan dan pengiriman laporan SLO/LO	Kontinyu
19	Sistematika penulisan dan esensi laporan	mudah dipahami
20	Penyebaran informasi masalah actual internal Dan eksternal	

3. Variabel faktor lingkungan strategis dan sosial - budaya

No.	Faktor Lingkungan Strategis dan Sosial-budaya	Hasil/Kondisi
1	Lingkungan strategis penempatan SLO Polri	Sangat strategis
2	Lingkungan social budaya	Cukup adaptif
3	Kepekaan globalisasi informasi	Cukup peka
4	Tinjauan hadap peredaran gelap narkoba peredaran	Negara lintasan/jalur
5	Tinjauan thd kejahatan terorisme internasional	Negara lintasan/jalur terorisme
6	Tinjauan terhadap trans-nasional crime	Negara lintasan/jalur transnasional crime

4. Faktor kendala

Masih adanya penilaian di kalangan komunitas diplomat penempatan SLO Polri merupakan kendala tersendiri. Beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a) Soal azaz recipocal dala penempatan SLO

NO	Interval kelas (%)	Nilai tengah (x)	Jumlah responden (f)	(f) * (x)	MEAN (rata-rata) (%)
(1)	67 - 100	83,50	5,00	417,50	
(2)	36 - 66	50,00	7,00	350,00	63,96
(3)	00 - 33	16,50	0,00	0,00	
	<b>Jumlah</b>		12,00	767,50	

Soal pendapat azaz reciprocal sebagai pedoman yang digunakan beberapa negara yang telah menempatkan SLO polisinya di negara Indonesia, rata-rata jawaban responden kalangan Dubes/Staf Kedubes cenderung dilakukan dengan cara pemberitaan saja. Nilai mean sebesar 63,96 untuk skala 2 (34-66) Ini artinya bahwa azaz reciprocal dalam penempatan SLO tidak perlu diatur dalam saluran diplomatik. Kesimpulan ini merupakan persoalan yang tersendiri bagi penempatan SLO/LO Polri.

b) Soal penempatan SLO Polri diatur dalam perjanjian internasional.

NO	Interval kelas (%)	Nilai tengah (x)	Jumlah responden (f)	(f) * (x)	MEAN (rata-rata)
(1)	67 - 100	83,50	2,00	167,00	
(2)	36 - 66	50,00	5,00	250,00	46,65
(3)	00 - 33	16,50	3,00	49,50	
	<b>Jumlah</b>		10,00	466,50	

Kecenderungan ini terlihat pula pada tanggapan responden tentang penempatan SLO Polisi Negara sahabat perlu diatur dalam perjanjian internasional. Kesimpulan ini didasarkan perhitungan statistik yang menunjukkan bahwa nilai mean untuk jawaban responden hanya 46,65 pada skala 2 (34-66). Nilai mean ini semakin memperkuat pendapat bahwa penempatan SLO tidak perlu diatur dalam saluran diplomatik. Adanya kecenderungan seperti ini, tentu merupakan kendala yang dihadapi Polri di dalam menempatkan SLO Polri di Negara-negara sahabat.

## SIRAMAN ROHANI

Assalamu'alaikum wr wb

ADA syarat yang harus dipenuhi agar doa kita dikabulkan, yakni senantiasa menjalankan hidup dengan kebenaran. Menjalankan hidup dengan benar adalah dengan memnuhi segala perintahNya dan beriman kepadaNya seperti yang disinggung dalam surat Al Baqarah :186 tersebut.

Memang tidak jarang manusia berpaling dari kehidupan yang benar setelah doanya dikabulkan, seolah-olah kebahagiaan hidup hanyalah kemudahan di dunia ini saja. Seolah-olah mereka tidak akan lagi berhadapan dengan kesulitan lainnya. Manusia juga sering lupa akan kebahagiaan akhirat kelak.

Seorang hamba seharusnya punya keinginan kuat untuk selalu hidup bahagia di dunia dan akhirat. Keinginan kuat itu bisa terwujud dengan ikhtiar yang kuat pula. Namun, jangan pernah melupakan doa kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Allah mengajarkan kepada orang yang beriman untuk berdoa demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Doa itu termuat dalam surat Al Baqarah ayat 201, "Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah wa kina adzabannar" ( Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka). Keinginan yang kuat untuk dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat juga harus dibarengi dengan doa yang sungguh-sungguh.

Wassalamu'alaikum wr wb

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### a. Parameter kelayakan

- 1) Jumlah populasi WNI pekerja/Mhs/pelajar
- 2) Negara yang mempunyai teknologi kepolisian tinggi
- 3) Negara yang berbatasan dengan wilayah RI
- 4) Negara yang memiliki hubungan dengan kasus terorisme
- 5) Negara terdapat markas Peace keeping Operation
- 6) Negara mempunyai arus perdagangan tinggi dengan RI
- 7) Negara yang berpotensi/real ttg kasus narkoba
- 8) Negara yang berpotensi/real mempunyai afiliasi dengan separatisme
- 9) Negara yang masuk dalam persetujuan AMMTC + 3 di luar ASEAN
- 10) Negara yang berpotensi/real memiliki hubungan dengan kejahatan transnasional
- 11) Negara lain yang sudah mempunyai perwakilan pol di Indonesia
- 12) Negara yang berpenduduk di atas 100 juta orang
- 13) Negara ASEAN + INDIA dlm upaya tanggulangi TC
- 14) Negara ASEAN + AS
- 15) Negara ASEAN + AUSTRALIA
- 16) JUMLAH Y dan N

##### b. Skala prioritas negara tujuan penempatan LO/SLO Polri

Dari kerjasama penegakan hukum dan penanganan kejahatan lintas Negara (*trans-national crime*) dengan negara lain di kawasan Asean dan Asia, maka negara-negara mendapat prioritas berdasarkan penilaian variabel potensi kelayakan adalah:

- 1) Singapura,
- 2) Brunei Darussalam,
- 3) Vietnam,
- 4) BRC,
- 5) Korea Selatan,
- 6) Myanmar,
- 7) Kamboja,
- 8) Laos.

Dilihat dari negara yang terdapat jumlah populasi WNI besar serta negara belum ada SLO/LO Polri, maka muncul negara-negara yang dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1) Hongkong (61.020 orang WNI),
- 2) Republik Rakyat Cina (40.956 orang WNI),
- 3) Singapura (40.238 orang WNI),

- 4) Korea Selatan (25.167 orang WNI),
- 5) Brunei Darussalam (20.000 orang WNI),
- 6) Jepang (19.246 orang WNI),
- 7) Belanda (13.976 orang WNI),
- 8) Amerika (12.339 orang WNI),
- 9) India (8.573 orang WNI),
- 10) Inggris (5.117 orang WNI),
- 11) Jerman (4.343 orang WNI).

Sedangkan jika dilihat berdasarkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, maka negara-negara yang belum ditempatkan SLO/LO Polri adalah :

- 1) Korea Selatan (24.961 orang TKI),
- 2) Hongkong (22.622 orang TKI),
- 3) Singapura (6.103 orang TKI),
- 4) Jepang (1.388 orang TKI),
- 5) Brunei Darussalam (1.146 orang TKI), dan
- 6) Amerika (171 orang TKI).

Negara-negara berdasarkan jumlah WNI dan TKI di luar negeri sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata juga ada beberapa negara yang memiliki hubungan kerjasama perdagangan yang cukup penting bagi Indonesia. Berdasarkan hal ini terdapat 5 (lima) negara tujuan ekspor terbesar. Negara-negara dimaksud adalah :

- 1) Jepang (nilai ekspor US\$ 13.603.495.031),
- 2) Amerika (nilai ekspor US\$ 7.373.740.659),
- 3) Singapura (nilai ekspor US\$ 5.399.657.659),
- 4) Korea (nilai ekspor US\$ 4.323.757.250),
- 5) Republik Rakyat Cina (nilai ekspor US\$ 3.802.530.088).

##### c. Evaluasi terhadap kinerja LO/SLO Polri

Dari parameter-parameter standar dan kinerja SLO/LO Polri sebagaimana pada uraian terdahulu, maka yang perlu mendapat perhatian dan memerlukan peninjauan kembali adalah

- 1) parameter biaya operasional SLO/LO Polri/tindakan kepolisian
- 2) parameter penyaluran anggaran
- 3) parameter eselonisasi jabatan
- 4) parameter periode penugasan
- 5) parameter system penggajian

#### 2. Saran / Rekomendasi

a. Skala prioritas dalam penempatan atase kepolisian (SLO) di negara-negara kawasan Asean dan Asia, ditinjau dari hasil kajian parameter potensi kelayakan, maka Negara yang dapat direkomendasikan segera adalah sebagai berikut :

- 1) Singapura
- 2) Korea Selatan
- 3) Hongkong

- 4) Jepang
- 5) Republik Rakyat Cina
- 6) Brunai Darussalam

- b. Landasan Yuridis penempatan SLO Polri selain mengacu kepada prinsip-prinsip Hukum Internasional, maka salah satu dasar pertimbangan lainnya dalam penempatan Atase Kepolisian di negara-negara kawasan Asia Pasifik adalah dengan Menerapkan "*Azas Reciprocal Base Principle*" bagi kepolisian negara-negara yang sudah terikat dengan perjanjian "*Arrangement on Cooperation*" dengan Polri baik dalam kerjasama bilateral maupun multilateral.
- c. Untuk mempercepat proses realisasi penempatan atase kepolisian di beberapa negara kawasan Asean dan Asia seyogyanya perlu diadakan MOU antar instansi terkait yakni : Deplu - POLRI – Men Pan, serta instansi teknis lainnya dalam bentuk "*Mandatory Counsellor Notification*" dengan demikian struktur SLO Polri menjadi bagian dari "*International Police Cooperations*" sehingga jabatan SLO Polri sejajar dengan atase teknis lainnya dan menjadi bagian dari "*Corp Diplomatic*".
- d. Didasarkan pada prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang berlaku dan dikenal dikalangan diplomatik maka istilah SLO/LO Polri perlu disetarakan baik status, nama, maupun eselonisasi jabatannya dengan atase teknis lainnya. Oleh karena itu, nama atau istilah SLO Polri perlu diganti menjadi atase kepolisian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terhadap responden dubes yang menyatakan keragu-raguannya tentang posisi SLO Polri sebagai sekretaris I bidang politik sebab akan membawa konsekuensi di mata pihak luar pejabat tersebut sebagai *Political Officer* yang tidak akan maksimal menjalankan fungsi dan perannya sebagai SLO Polri.
- e. Ditinjau dari variabel aspek lokasi dan sarana prasarana pendukung, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja SLO Polri yang sudah tersebar di luar negeri

antara lain sebagai berikut:

- 1) Tunjangan penghidupan di luar negeri (TPLN) agar diupayakan setara dengan atase teknis lainnya
- 2) Biaya operasional SLO Polri di upayakan ditingkatkan.
- 3) Penyaluran anggaran kepada SLO Polri jangan sampai terlambat
- 4) Eselonisasi jabatan SLO Polri di setarakan dengan atase teknis lainnya
- 5) Periode penugasan SLO Polri yang ideal dengan jangka waktu 2-3 tahun

## BAB VI

### PENUTUP

Demikian Ringkasan Eksekutif tentang "Study kelayakan penempatan SLO/LO Polri di kawasan ASEAN dan Asia" dilaksanakan di enam (6) Negara baik ASEAN maupun Asia, semoga kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

Jakarta, 2005

#### TIM PENELITI:

1. Kombes Pol. Atim Supomo, SMIK
2. Kombes Pol. Suroso, SH
3. AKBP. Rondiah, BSc
4. Kompol. Wadi, SH
5. Drs. Ary Wahyono, M.Si
6. AKP. Fachrurrozi, S.Ag
7. AKP. Suyatini
8. AKP. Ida Ayu Rupini
9. AKP. Bambang Harnoko, S.Si